

STUDI TENTANG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KELURAHAN SANGASANGA MUARA KECAMATAN SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhamad Azmi Azaki¹

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Studi Tentang Pembangunan Pertanian Di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kertanegara. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugyono 2013), yang meliputi : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan Pertanian Di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kertanegara masih belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa pembangunan pertanian yang terealisasi masih banyak kekurangan khususnya pada ketersediaan lahan pertanian, pemenuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang masih terbatas, anggaran penyuluhan pertanian yang terbatas, dan pendapatan petani yang belum dirasakan secara merata, faktor pendukung dalam pembangunan pertanian adalah dekat aliran sungai dan semangat bertani masyarakat kelurahan sedangkan faktor penghambatnya meliputi bantuan tidak tepat sasaran, minim anggaran, butuh waktu yang cukup lama untuk menunggu bantuan dan keterbatasan lahan di Kelurahan Sangasanga Muara.

Kata Kunci: *Pembangunan, pertanian, pemenuhan, pengembangan, sarana, prasarana, pembiayaan, penyelenggaraan penyuluhan, pendapatan, petani.*

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis bagi Kabupaten Kutai Kertanegara dalam struktur pembangunan perekonomian. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan. Perkembangan luas panen padi sawah di Kutai Kertanegara Mengalami penurunan sebesar 4,23% dan padi ladang mengalami

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: azmiazaki27@gmail.com

penurunan 6,15%. Secara rill luas panen padi sawah turun dari 35.443 Ha ditahun 2014 menjadi 34.002 Ha ditahun 2015, Sedangkan luas padi ladang menurun dari 4.246 Ha ditahun 2014 Menjadi 4.002 Ha ditahun 2015.

Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya. Perjalanan pembangunan pertanian di Kabupaten Kutai Kertanegara hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan daerah. Pembangunan pertanian di Kutai Kertanegara dianggap penting dari keseluruhan pembangunan daerah.

Fokus arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara mengarah pada lima pokok yakni, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan dan pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan berusaha, peningkatan daya saing daerah, dan kelestarian lingkungan. RPJMD Kabupaten Kutai Kertanegara secara umum tidak terlepas dari pencapaian tujuan pembangunan tersebut, adapun secara spesifik struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kertanegara hingga saat ini masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga diperlukan desain pembangunan jangka panjang yang menempatkan sektor terbarukan menjadi leading sektor perekonomian pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, yang menjadi fokus kebijakan adalah pertanian yang merupakan salah satu sektor potensial yang harus dikembangkan dan diperkuat dalam sistem perekonomian daerah. Atas dasar tersebut prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kertanegara periode 2016-2021 difokuskan tetap pada proses transformasi perekonomian daerah dengan mengoptimalkan sektor terbarukan melalui pembangunan pertanian dan pariwisata daerah yang lebih maju dalam skema sinergi dan terukur.

Kelurahan Sangasanga Muara merupakan salah satu dari 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sangasanga yang mempunyai potensi pertanian yang cukup baik dilihat dari jumlah lahan potensi yang mencapai 2.400 Ha. Ketersediaan lahan yang juga harus berbanding lurus dengan jumlah petani maupun tingkat kesejahteraan petani yang ada di Kelurahan Sangasanga Muara.

Hasil pengamatan awal yang di dukung oleh berbagai informasi, peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertanian dapat diidentifikasi berbagai fenomena yaitu belum optimalnya Pemerintah daerah dalam penganggaran penyediaan sarana dan prasarana maupun penyuluh pertanian kepada masyarakat petani untuk meningkatkan produktifitas tanaman pertanian. masyarakat menganggap pemerintah daerah pada sisi lain masih kurang memberi perhatian tentang dukungan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh petani di dalam meningkatkan hasil pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani. Jika pihak Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap potensi yang dimiliki maka peluang untuk kemajuan daerah tersebut akan lebih besar.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu **“Studi Tentang Pembangunan Pertanian Di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kertanegara”**.

Kerangka Dasar Teori

Studi

Pengertian Studi Eksplorasi Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, sedangkan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Studi eksplorasi merupakan penelitian yang berangkat dari beberapa rasional dan petunjuk untuk mengidentifikasi masalah yang mencakup sejumlah peristiwa yang berkisar pada keputusan-keputusan, program-program, proses implementasi, dan perubahan oeganinsasi (Mudzakir, 2006: 31).

Arikunto (2010: 14) menjelaskan bahwa studi eksploratif adalah penelitian yang berusaha menggali sebab-sebab atau hal-hal awal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu serta menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa studi eksplorasi merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak kemudian memperoleh gambaran dan penjelasan yang mendalam tentang suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi.

Peran

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta,1995). Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta, 1995). Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain. Peranan (role) merupakan aspek

dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya Soekanto (2001:268).

Pemerintah Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan *masyarakat* melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya masyarakat daerah, maka di pandang perlu menyelenggarakan otonomi luas kepada daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut (pengaturan mengenai desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 371). Pemerintahan daerah sebagai perangkat pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber-sumber yang ada secara keseluruhan di daerahnya masing-masing, baik itu sumberdaya alam yang ada maupun sumberdaya manusia yang ada di daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi

hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreativitas dan berekspressi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pembangunan

Menurut Effendi (2002:2) Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Menurut Soekanto (2005:437) “Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan dikehendaki”. Pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi pembangunan merupakan suatu usaha perubahan yang hendak dicapai oleh masyarakat ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu.

Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan definisi bahwa pembangunan itu adalah proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil pemanfaatan hasilnya dan pembangunan merupakan suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat.

Pembangunan Pedesaan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Egon E. Bergel (dalam Raharjo, 2004) desa adalah setiap pemukiman para petani. Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meletakkan landasan yang kokoh kuat bagi masyarakat pedesaan untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri di dalam melaksanakan pembangunan desanya, sedangkan peranan Pemerintah dalam hal ini hanyalah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya gotong-

royong masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan desa swasembada. (www.bappenas.go.id)

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran pembangunan pedesaan dalam jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sasaran pembangunan pedesaan dalam jangka panjang adalah untuk meletakkan landasan pembangunan nasional yang sehat dan kuat agar desa - desa mampu melaksanakan pembangunan desanya sendiri secara swadaya dan gotong-royong.

Strategi Pembangunan Pedesaan dan kelurahan

Usman (2004), menyatakan ada 4 strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan di pedesaan yaitu:

1. pembangunan pertanian
2. Industrialisasi Pedesaan
3. Pembangunan masyarakat desa terpadu melalui pemberdayaan
4. Strategi pusat pertumbuhan.

Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian menurut (Lynn, 2003) adalah bagian utuh dari pembangunan. Industri harus menyediakan barang untuk petani. Lapangan kerja non pertanian perlu untuk mempertahankan keluarga di daerah pedesaan. Produksi pangan harus konsisten dengan selera konsumen.

Dalam pembangunan pertanian sangat dibutuhkan peranan dari pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan swasembada pangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pasal 8 ayat d yang menyatakan peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena di suatu tempat yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Tentang Pembangunan Pertanian di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:
 - a. Pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
 - b. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 - c. Peningkatan pendapatan petani adalah peningkatan pendapatan perkapita anggota masyarakat petani di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pembangunan pertanian di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian

Studi Pembangunan Pertanian

Secara ringkas pembangunan adalah perubahan dan pertumbuhan, khususnya perubahan sosial atau struktur sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pembangunan adalah usaha sadar guna mengadakan perubahan sosial atau struktur sosial dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Adapun sasaran pembangunan dalam upaya meraih kehidupan/ kesejahteraan yang lebih baik adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.
- b. Meningkatkan kualitas atau taraf hidup, tidak hanya yang bersifat material, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri sebagai individu maupun bangsa.
- c. Memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial dengan membebaskan diri dari perbudakan, ketergantungan, kebodohan dan kesengsaran.

Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian anggota masyarakat Kelurahan Sangasanga Muara menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu meningkatkan produksi pertanian yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap petani dengan menambah kualitas maupun kuantitas dari produksi pertanian.

Pemenuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.

Secara umum sarana dan prasarana pertanian adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam kegiatan pertanian baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pertanian.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kinerja seorang petani adalah sejauh mana kegiatan pertanian yang dijalankannya ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ketidaksiadaannya

sarana prasarana pertanian akan berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya penyelenggaraan pertanian, lebih parahnya lagi dapat menjadi masalah serius bagi penyuluh. Merujuk pada pendapat Van Den Ban dan Hawkins (1999) bahwa ketidak tersedianya sarana penunjang untuk kegiatan pertanian menimbulkan masalah bagi seorang petani yang kehilangan kepercayaan dari petani karena dianggap tidak mampu menyediakan sarana yang mereka butuhkan. Sebagai seorang petani yang mempertaruhkan kepercayaan dalam tugasnya tidak ada lagi hal paling buruk selain kehilangan kepercayaan dari petani.

Rincian tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pertanian:

1. Menyusun kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian
2. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas
3. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian
5. Melakukan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian
6. Memantau dan mengevaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian
7. Membina dan mengembangkan kegiatan rehabilitasi lahan, dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan yang telah berjalan
8. Melakukan pemantauan alat dan mesin pertanian serta ketersediaan pupuk dan pestisida.
9. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan air pertanian
10. Melakukan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan air
11. Mengatur ketersediaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian Mengolah dan memproses bahan dan data penyusunan
12. Juklak, Juknis dan Petunjuk Operasional dan data kegiatan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan perlindungan tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan air
14. Melakukan inventarisasi alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembiayaan Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian

Dari hasil wawancara maupun data yang ada dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran yang ada menyulitkan tim penyuluhan pertanian untuk melakukan kordinasi maupun pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan maupun pemahaman tentang pertanian modern, tentu

jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan berdampak pada kesejahteraan maupun peningkatan produksi pertanian.

Penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan informasi (pesan) yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi teknologi pertanian baru.

Umumnya pesan terdiri dari sejumlah simbol dan isi pesan inilah yang memperoleh perlakuan. Bentuk perlakuan tersebut memilih, menata, menyederhanakan, menyajikan dan lain-lain. Simbol yang mudah diamati dan paling banyak digunakan yaitu bahasa. Keputusan- keputusan yang dibuat oleh penyuluh pertanian atau sumber untuk memilih serta menata isi pesan dan simbol yang digunakan pada pesan dapat dikatakan teknik penyuluhan pertanian (Kusnadi 2011).

Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peranan penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada petani, sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman yang dibudidayakan petani serta dapat mensejahterakan petani (Saadah dkk., 2011).

Peningkatan Pendapatan Petani

Hasil wawancara dan tabel Ragam pemasaran hasil pertanian menunjukkan bahwa Hasil pertanian Di Kelurahan Sangasanga Muara masih dikelola oleh masyarakat petani secara mandiri sebagian lagi dijual di sekitar tempat tinggalnya. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasar dan harga yang terjangkau. Lambannya pengembangan industri pengolahan ini akan terus berlangsung bila tidak diikuti dengan upaya-upaya untuk memperluas pasar. Tentunya jika hal tersebut dapat dilkauan akan berdampak pada pendapatan petani sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi setiap petani.

Oleh karena itu kesejahteraan petani sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pembangunan pertanian baik dalam pemenuhan dan pengembangan sarana, prasarana pertanian maupun pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga masyarakat juga mempunyai keterjaminan akan pasar dari produksi pertanian, adanya produksi pertanian yang cukup tentu tidak akan cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa dibarengi Menurut Hernanto (1994), besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang

mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga berubah (Soekartawi, 1990).

Menurut Gustiyana (2003), pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usahatani. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (*output*) dan biaya produksi (*input*) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, mengojek, dll.

1. Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004), dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

- a. pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil.
- b. pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi.

Dalam pendapatan usahatani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut (Ahmadi, 2001). Produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi tersebut (Mubyarto, 1989).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Adapun Faktor Pendukung pembangunan pertanian di Sanga-sanga Muara sebagai berikut:

1. Dekat Aliran Sungai
2. Semangat bertani masyarakat kelurahan.

Faktor Penghambat

Adapun Faktor Penghambat pembangunan pertanian di Sanga-sanga Muara sebagai berikut:

1. Bantuan tidak tepat sasaran
2. Minim Anggaran
3. Butuh waktu yang cukup lama untuk menunggu bantuan
4. Keterbatasan Lahan

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pemenuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian di Kelurahan Sangasanga Muara tergolong masih kurang terutama dalam penyediaan lahan untuk bertani, sedangkan sarana dan prasarana masih terbatas untuk pemenuhan dan pengembangan pertanian dalam menunjang pelaksanaan pertanian oleh masyarakat.
2. Pembiayaan penyuluhan pertanian pertanian Masyarakat di Kelurahan Sangasanga Muara memiliki ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga program-program yang disusun tidak dapat berjalan dengan baik.
3. Pendapatan Petani di Kelurahan Sangasanga Muara saat ini belum bisa dirasakan secara merata karena hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat petani terutama kelompok tani yang menerima bantuan pertanian seperti handtraktor, pupuk, bibit, alat tanam padi dan sebagainya dari pemerintah.
4. Faktor pendukung dalam pembangunan pertanian di Kelurahan Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kertanegara memang secara geografis sangat cocok untuk ditanami padi sawah karena bermuara langsung dengan sungai Mahakam sehingga para petani tidak mengalami kesusahan dalam mengairi sawah mereka kemudian semangat bertani yang dimiliki masyarakat Kelurahan juga menjadi pendukung dalam pembangunan pertanian di Kelurahan Sangasanga. Faktor penghambat dalam pembangunan pertanian terletak pada bantuan yang tidak tepat sasaran, minimnya anggaran, waktu pengusulan program yang cukup lama dan pemanfaatan lahan yang belum maksimal tentu hal tersebut berdampak pada minimnya minat dari masyarakat sekitar untuk bertani.

Saran

1. Pemerintah daerah khususnya UPT Pertanian harus secara rutin mengevaluasi pembangunan pertanian maupun harus mampu menganalisa apa yang menjadi kebutuhan dari para petani khususnya dalam pemenuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, dan penyediaan pasar untuk hasil produksi petani.
2. Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan yang ada di Kelurahan Sangasanga Muara harus lebih berupaya untuk merangsang dan mengoptimalkan

koordinasi antara masyarakat, penyuluh pertanian, dan UPT Pertanian dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian.

3. Pemerintah harusnya membuat pasar di setiap Kecamatan agar hasil produksi pertanian dapat terdistribusi dengan baik.
4. Pemerintah harus membuat anggaran bagi penyuluh pertanian agar program-program dalam pembangunan pertanian dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bobo, Julius. 2003. *Transformasi ekonomi Rakyat*. Jakarta: Cidesindo.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Hanani dkk . 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian*. Lappera Pustaka Utama: Bantul.
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiolog,ekonomi, Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moleong, Lexi J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyu. 2005. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah (Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru)*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.